

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2004

# Pertamina minta kenaikan *fee* pengolahan

JAKARTA (Bisnis): PT Pertamina meminta pemerintah menaikkan *fee* pengolahan dan pemasaran BBM dari US\$0,40 per barel menjadi US\$0,80 per barel mengingat biaya pengolahan dan distribusi BBM Pertamina saat ini sangat rendah.

Direktur Hilir PT Pertamina Harry Pur-nomo menuturkan permintaan kenaikan *fee* tersebut akan disampaikan direksi pekan ini.

"Permintaan kenaikan itu sangat wajar. Mengingat biaya pengolahan dan distribusi BBM yang dilakukan perusahaan saat ini hanya sebesar US\$0,20 per barel. Biaya itu rendah membuat perusahaan nombok. Jadi, kami akan meminta kenaikan *fee* dari US\$0,40 per barel menjadi US\$0,80 per barel," tuturnya di Jakarta kemarin petang.

Menurut dia, kenaikan *fee* di sektor hilir ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja PT Pertamina setelah menjadi persero. "Sudah bukan saatnya kerja bakti lagi, mengingat perusahaan sekarang sudah dituntut untuk mencari keuntungan," katanya.

Harry mengatakan *fee* yang saat ini diterima PT Pertamina sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan migas lainnya. Dia menginformasikan untuk liberalisasi sektor hilir ke depan, PT Pertamina akan meminta *fee* pengolahan dan distribusi sebesar US\$4 sampai US\$5 per barel.

Pengamat migas Kurtubi mendukung keinginan PT Pertamina kepada pemerintah untuk meningkatkan *fee*. "Permintaan itu sangat realistis mengingat sampai saat ini *fee* yang diterima PT Pertamina sangat rendah dibandingkan perusahaan migas lainnya," ujarnya kepada *Bisnis*.

Dia menjelaskan *fee* yang diperoleh PT Pertamina saat ini sebanyak US\$0,40 per barel harus dibagi untuk *fee* kilang sebesar US\$0,20 per barel, dan US\$0,20 *fee* untuk distribusi.

Menurut dia, perusahaan minyak di Singapura sudah mendapatkan *fee* sebesar US\$8,5 per barel yang terdiri dari *fee* pengolahan sebesar US\$2,5 per barel dan *fee* distribusi sebesar US\$6 per barel.

"Contoh yang paling ekstrim untuk *fee* pengolahan dan distribusi ini seperti di pantai Barat Amerika dimana perusahaan migas di sana mampu mendapatkan *fee* pengolahan sebesar US\$12 per barel, dan *fee* marketing sebesar US\$8 per barel," katanya.

## Dukungan pemerintah

Kurtubi menambahkan dengan status Pertamina yang sudah berubah menjadi persero harus ada perhitungan *business to business*. Kenaikan *fee* pengolahan dan distribusi BBM ini, katanya, dilakukan bertahap dan sejalan dengan kenaikan BBM.

Dia mengatakan dengan tuntutan PT Pertamina ini sudah sewajarnya mendapatkan dukungan dari pemerintah. "Jika tuntutan tersebut dapat dikabulkan, dan tidak berhenti pada kisaran US\$0,40 per barel, maka BUMN itu dapat berkompetisi secara sehat di pasar bebas," tutur Kurtubi.

Menyinggung tentang harga BBM, Kurtubi mengatakan saat ini daya beli masyarakat masih sangat rendah. Dengan demikian, katanya, adanya liberalisasi sektor hilir dan penentuan harga BBM sesuai pasar seperti yang diamanatkan UU Migas tidak mungkin terjadi pada 2005.

"Saya perkirakan penetapan harga BBM sesuai harga pasar baru dapat dilakukan pada 2007. Hal inipun perlu dilakukan dengan catatan jika kondisi dalam negeri aman, investasi dan tenaga kerja berjalan, dan ada penyesuaian ulang format harga BBM," katanya.

Kurtubi mengatakan harga jual BBM saat ini seperti premium sebenarnya lebih cocok dengan harga Rp2.300 sampai Rp2.500 per liter. "Harga premium saat ini yang dijual dengan harga Rp1.810 per liter tidak menutup biaya produksi perusahaan, bahkan PT Pertamina masih nombok," katanya. (dle)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 14										TAHUN 2004	

## Harga Minyak Melemah

LONDON, SENIN — Setelah sempat mencapai rekor tertinggi 42,45 dollar AS per barrel pada 1 Juni lalu, harga minyak mentah dunia terus melemah. Pada hari Senin (7/6) kemarin harga minyak mentah untuk penyerahan bulan Juli di pasar London kembali melemah 68 sen dollar AS menjadi 34,99 dollar AS per barrel.

Kalangan pedagang mengemukakan, harga minyak cenderung melemah setelah pihak negara-negara pengekspor minyak OPEC sepakat menaikkan kuota produksi dengan 2,5 juta barrel per hari menjadi 26 juta barrel per hari mulai 1 Agustus mendatang. Pasar juga dipengaruhi laporan Departemen Energi AS (DOE) yang menyebutkan peningkatan dalam cadangan minyak nasional di AS.

Meningkatnya harga minyak mencapai 42 dollar AS—rekor harga tertinggi dalam 21 tahun terakhir ini—setelah pasar khawatir pasokan minyak mentah dunia akan terganggu akibat kondisi keamanan di negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Kekhawatiran ini diperkuat lagi dengan perkiraan bahwa permintaan minyak dunia akan meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Di New York, harga minyak untuk kontrak bulan Juli juga turun 62 sen menjadi 37,87 dol-

lar AS per barrel pada akhir pekan lalu. Ini berarti, harga minyak dalam sepekan ini sudah turun 4 dollar AS per barrel atau sekitar 10 persen dari harga tertinggi 42,45 dollar AS per barrel. "Determinasi dari OPEC guna menekan harga, secara psikologis menekan pasar," ujar Tom Bentz, analis pasar energi pada BNP Paribas, New York.

Harga minyak yang melambung tinggi ini telah menimbulkan dampak luas. Nilai dollar AS melemah karena harga minyak telah mendorong inflasi di AS dan ini bisa berakibat pada kenaikan suku bunga AS. Harga minyak juga dinilai akan menekan laju pemulihan ekonomi di Eropa dan Asia, terutama negara-negara yang mengimpor minyak.

Para pejabat negara-negara di Asia Timur bertemu di Manila, Filipina, hari Senin (7/6), guna membahas rencana bersama membentuk pembentukan cadangan minyak dan menemukan alternatif lain di luar minyak mentah. Para menteri ini berasal dari ASEAN, China, Jepang, dan Korea.

Sekalipun harga minyak terus melemah, namun pasar dilaporkan tetap was-was akan kemungkinan gangguan teroris pada pasokan minyak terutama dari negara-negara pengekspor utama minyak mentah di Timur Tengah. (AFP/REUTER/PPG)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2004

**Harga Minyak Mulai Turun Di Asia**

SINGAPURA (Suara Karya): Harga minyak terus turun di perdagangan Asia setelah Irak mengatakan bahwa pihaknya akan menaikkan produksi menjadi tiga juta barel per hari (bph) pada akhir tahun dari sekitar 2,5 juta bph saat ini, para dealer mengatakan.

Pada tengah hari (04.00 GMT), minyak mentah light sweet Nymex untuk pengiriman Juli diperdagangkan 38,36 dolar AS per barel, turun dari penutupan di New York Jumat 38,49 dolar AS per barel dan berkurang dari tingkat rendah dari hari ke hari 38,27 dolar AS per barel.

Harga minyak telah turun sejak OPEC setuju untuk menaikkan produksi dua juta barel pada bulan Juli dan cartel itu akan menaikkan produksi lagi 500.000 bph pada bulan Agustus.

Namun para dealer khawatir apakah kontrak penyerahan kemudian Nymex dapat menopang tren penurunan harga ke arah di bawah 38 dolar AS.

"Harga ini tergantung pada situasi keseluruhan di Timur Tengah," seorang pedagang pada perusahaan perdagangan minyak Jerman mengatakan.

Dia mengatakan, harga minyak dapat dengan mudah naik menghadapi adanya tanda-tanda yang cerah di bagian lain Arab Saudi dan Timur Tengah. (Ant)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

# Oil falls further below \$40, downside seen limited

Reuters  
 London

Oil prices dropped further below US\$40 on Monday as increased supplies in the United States and OPEC's pledge to bump up output eased immediate concerns of a supply crunch in world markets.

Oil dealers said the downside potential for prices would be limited by fears of security risks in the oil-rich Middle East and worries U.S. gasoline stocks would be drained as the summer driving season picks up, despite the latest supply increase.

U.S. light crude for July dropped 65 U.S. cents to \$37.84 per barrel on Monday, more than 10 percent below a 21-year high of \$42.45 traded last week.

London Brent crude was down 72 U.S. cents at \$34.95 a barrel. The fall in prices will be welcome news for

leaders of the world's leading industrialized nations, known as the G-8, who meet from Tuesday in the United States.

Prices dropped last week after the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) pledged to raise official output by two million barrels per day (bpd) from July and a further 500,000 bpd from August.

Saudi Arabia, the world's biggest exporter, and fellow OPEC member United Arab Emirates said they would pump an extra one million bpd between them, regardless of OPEC policy.

"Saudi Arabia looks determined to soften oil prices with more oil production, said Deutsche Bank in a report. "Expect a summer inventory build, as Saudi pumps up over 9 million barrels per day".

U.S. crude stocks rose in the latest weekly data to their highest since August

2002 and gasoline stocks increased, offering some relief after the world's biggest oil consumer entered its so-called driving season, when Americans hit the roads for vacations.

However, the data showed that gasoline stocks still remain close to four million barrels below a year earlier and stocks are below five-year averages, supporting concerns that supplies could tighten once again.

Reinforcing the worries, the U.S. Energy Secretary Spencer Abraham urged U.S. refineries to run at full capacity to ensure gasoline supplies.

"I made it clear to them that we wanted to see no diminishment in refining capacity during this peak summertime period," he said last week after a meeting with refiners.

U.S. gasoline prices, which reached a record high retail price last month, have

become a key issue ahead of the November presidential vote.

The killing of an Irish cameraman and the wounding of his British colleague by gunmen in Saudi Arabia on Sunday once again raised fears over security in the kingdom.

The attack came a week after al Qaeda militants killed 22 people, 19 of them foreigners, in the eastern oil city of Khobar. Oil hit a 21-year high following the attack.

With healthy world economic growth leading to higher than expected oil demand, some analysts fear that oil supplies will remain tight for some months to come.

Analysts say the increase in OPEC's official supply ceiling to 25.5 million bpd from 23.5 million bpd will make little difference to actual world supplies because OPEC is already pumping more than two million bpd above its limit.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

# Minyak Pertamina Geser Singapura

Bachrawi Sanusi

Lektor Kepala Fakultas Ekonomi, dan  
Anggota Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya  
Mineral Universitas Trisakti

**H**arian *Republika* edisi Sabtu (17/4) menurunkan berita dengan judul "Pertamina Pasok Kebutuhan Bahan Bakar Inco". Isi beritanya antara lain bahwa PT Pertamina (Persero) bakal memasok kebutuhan minyak bakar (high sulfur fuel oil/HSFO) PT International Nickel Indonesia (Inco) Tbk sejumlah 280 ribu-barrel per bulan.

Selama ini kebutuhan HSFO Inco selalu diimpor dari Singapura. Memorandum of Understanding (MoU) jual-beli HSFO antara Pertamina dan Inco tersebut ditandatangani pada Kamis (15/4). Adapun harga jualnya mengacu pada harga rata-rata MOPS selama satu bulan penuh pada bulan sebelumnya.

Harga minyak bakar 180 centistokes ditambah biaya penanganan di pelabuhan muat sebesar 0,50 dolar AS per metrik ton. Juga ditambah biaya-biaya lain. Biaya angkutan lautnya sebesar tujuh dolar AS per metrik ton untuk ukuran kapal 30 ribu DWT, atau 8,1 dolar per metrik ton untuk ukuran kapal 20 ribu DWT. Biaya asuransi muatan sebesar 0,40 dolar AS per metrik ton. Perjanjian tersebut berlaku efektif mulai 15 Juli 2004 sampai 15 Juni 2005.

Dari berita yang menarik itu penulis anggap Pertamina yang sudah menjadi persero masih mampu menggeser minyak HSFO Singapura. Walau harus diakui sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 2001 mengenai Migas gerak usaha PT Pertamina semakin sempit. Tidak ada alasan bagi rakyat banyak mengeluh sekiranya BBM, terutama minyak tanah

atau premium atau solar, menjadi langka. Sebagai catatan, setelah menjadi persero, Pertamina tak lagi dibentuk dengan UU, tetapi hanya dengan akta notaris.

Dalam akta notaris berdirinya Persero Pertamina sepertinya yang dipentingkan hanya nama-nama dewan komisaris dan direksinya. Tidak terbaca bahwa Pertamina selayaknya harus tetap membantu masyarakat banyak seperti yang diatur dalam UU Pertamina No 8 tahun 1971 yang berhasil digilas dengan UU Migas tahun 2001 tersebut. Masalahnya dalam akta pendirian sepertinya tidak ada ketentuan mengenai tugas dan kewajiban PT Pertamina, yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Ini berarti pembabatan UU No 8 tahun 1971 merupakan jalan pintas untuk amandemen UUD 1945.

Jadi masyarakat jangan lagi mengharapkan pemerintah semakin memihak rakyat banyak dalam kecukupan pengadaaan BBM, apalagi dalam hal harga BBM. Selain itu, PT Pertamina seolah-olah dibebani dengan dua tonggak kekuatan. Tonggak pertama adalah Pertamina berada di bawah naungan non-departemen BUMN. Karena itu, menteri negara BUMN menjadi ketua dewan komisaris PT Pertamina. Hanya saja yang menjadi tanda tanya mengapa menteri BUMN tidak menjadi ketua dewan komisaris persero lainnya atau perbankan milik negara yang selalu sakit-sakitan alias merugi.

Tonggak kedua, Pertamina juga harus mengikuti aturan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di mana peran Badan Pelaksana (Balak) Migas tidak bisa lepas dari kebijakan menteri ESDM. Sebenarnya sudah sejak lama lewat berbagai media massa penulis mengusulkan, sekiranya pemerintah sangat menitik-beratkan segi produksi, ekspor, pemasaran dalam negeri, pengolahan, dan lain-lain, layak seluruh BUMN atau persero apa saja segera dikembalikan lang-

sung di bawah pengendalian serta pengawasan departemen teknis masing-masing. Ini berarti non-departemen BUMN harus hapus agar BUMN bisa beroperasi jauh lebih efisien karena tidak banyak tangan yang mau mengatur. Bukankah masalah pengawasan cukup sudah ada di BPK bahkan BPKP, juga inspektorat jenderal. Juga ada Departemen Keuangan. Hal ini juga untuk mencegah adanya anggapan bahwa pejabat BUMN sok, serba tahu untuk berbagai teknologi untuk menghasilkan berbagai jenis produk bahan mentah/ bahan baku atau hasil olahan. Di samping itu, juga untuk mencegah jangan sampai ada anggapan karena jumlah dan keahlian pejabat di non-departemen BUMN terbatas, sedangkan jumlah BUMN begitu banyak, dikhawatirkan setiap pejabat bisa duduk sebagai anggota dewan komisaris atau salah satu direksi dari berbagai BUMN. Selain itu, bisa mencegah adanya rasa iri antara pejabat departemen-departemen teknis dengan pejabat-pejabat non-departemen BUMN.

Jadi demi peningkatan produksi dan ekspor, maka seluruh BUMN harus segera hanya berada dalam satu pengawasan pengendalian yakni departemen teknis masing-masing. Tentu saja termasuk Pertamina, di mana ketua dewan komisarisnya menteri BUMN. Mengapa bukan menteri energi dan sumber daya mineral yang jelas lebih mengerti. Atau kalau bukan menteri cukup direktur jenderal minyak dan gas bumi sebagai ketuanya, bukan seperti sekarang dia hanya menjadi anggota. Mudah-mudahan ganti atau tidak digantinya presiden pada pemilu nanti, UU Migas No 22 tahun 2001 segera dibatalkan.

Sekiranya ingin agar Pertamina lebih berkembang lagi, selayaknya UU Migas No 22 tahun 2001 segera dibatalkan dan dihidupkan kembali UU Pertamina No 8 tahun 1971 dengan berbagai perubahaan mendasar. Khususnya mengenai ketua

dan anggota dewan komisarisnya jangan semuanya dijabat oleh para menteri. Kuasa pertambangan harus dikembalikan lagi kepada Pertamina. Pengawasan kepada para kontraktor harus dilakukan oleh Pertamina bukan oleh pemerintah. Memang, kontraktor migas asing akan merasa gembira sekiranya kontrak, pengawasan, kuasa tambang dipegang pemerintah. Karena sekiranya masih dipegang Pertamina sulit bagi kontraktor migas untuk memperpanjang kontraknya, terutama untuk lapangan-lapangan migas yang cadangan serta produksinya besar.

Sebagai BUMN, Pertamina sangat berkepentingan terhadap penguasaan cadangan/produksi migas yang besar. Dengan kondisi kuasa pertambangan berada di tangan pemerintah maka tak sulit bagi kontraktor migas asing untuk memperpanjang kontraknya. Kontraktor migas asing yang memiliki produksi dan cadangan migas yang besar bisa mengancam bahwa produksinya akan turun drastis. Akhirnya, pemerintah ketakutan dan memberikan perpanjangan kontrak.

Kontraktor migas asing akan mengalami kesulitan sekiranya yang mereka hadapi adalah Pertamina — tentu jika kuasa pertambangan ada di tangan Pertamina — yang sejak puluhan tahun mempunyai pengalaman mencari dan menghasilkan migas. Inilah yang merupakan alasan utama penulis agar UU Migas itu segera dibatalkan. Penulis khawatir akan sering terjadi kelangkaan BBM, khususnya minyak tanah yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Sejak lama penulis merasa sedih, karena kapasitas kilang minyak Pertamina masih terlalu kecil dibandingkan yang dimiliki Singapura yang bukan peng-

hasil minyak mentah dan gas bumi. Pada awal Januari 1998 kapasitas kilang minyak Singapura sebesar 1.157 ribu barrel per hari untuk kapasitas minyak mentah, untuk catalytic cracking 59.600 barrel per hari, dan catalytic reforming 127.000 barrel per hari. Sedangkan kilang minyak Indonesia pada periode yang sama kapasitas minyak mentah hanya 929.745 ribu barrel per hari, catalytic cracking 101.450 barrel per hari, dan catalytic reforming hanya 92.970 barrel per hari.

Singapura adalah negara pengimpor dan pengekspor minyak bumi, khususnya ekspor BBM hasil olahan dari kilang minyaknya. Sebagai gambaran, pada 2003 Singapura memiliki net impor minyak mentah sebanyak 755 ribu barrel per hari yang kemudian diekspor berupa gasoil/diesel/solar sebanyak 170; bensin 83; LPG 22; jet/minyak tanah 99; dan lain-lain produk 55 (masing-masing dalam ribu barrel per hari). Pada bulan Februari 2004 jumlah minyak mentah yang diimpor Singapura sebanyak 718 ribu barrel per hari. Yang diekspor berupa gasoil/diesel/solar sebanyak 129; bensin 74; LPG 26; jet/minyak tanah 107; dan lain-lain 63 (masing-masing dalam ribu barrel per hari). Sedangkan yang diimpor Singapura selain minyak mentah juga heavy fuel oil pada tahun 2002 sebanyak 334; 2003 sebanyak 320, pada Januari 2004 sebanyak 321 (masing-masing dalam ribu barrel per hari). Jadi Singapura adalah pengimpor heavy fuel oil (HSFO). Karena itu, jika ada kelebihan akan diekspor dan dengan harga yang sangat mahal. Jadi layak jika Inco beralih ke Pertamina.

Harga tunai (*spot price*) dari produk minyak Singapore Cargoes 44,10 dolar AS per barrel untuk premium unleaded 95 pada bulan Maret 2004; sedangkan naphtha 36,03; jet/kerosene 37,72; gasoil 37,71; LSWR (0,3 persen S) 29,27; HSFO (3,5 persen S 180 cst) 25,85, dan HSFO 4 persen S 25,76 (masing-masing dalam dolar AS per barrel). (Lihat MOMR, IEA/OECD, 9 April, 2004)

Jadi memang layak jika minyak Pertamina mampu menggeser minyak HSFO Singapura, karena Singapura juga mengimpor. Ini juga berarti hasil olahannya tidak cukup untuk kebutuhan dalam negeri Singapura, apalagi harus melakukan re-ekspor ke Inco misalnya. Inilah peluang PT Pertamina. Namun Pertamina harus bekerja keras karena ada dua mandor yang mengendalikan perusahaan BUMN tersebut. Hal ini jelas tidak efisien, terlalu banyak tangan dan pendapat. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2004

## Climbing crude oil prices

The Asahi Shimbun  
Tokyo

For the first time in a long while the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) grabbed headlines when it announced that it intended to increase oil production in a two-stage process.

Global markets appear to be puzzled about how to react to the decision. While increasing output is expected to curb climbing crude oil prices, many analysts think the decision amounted to a rubber-stamping of current, unapproved OPEC output, and thus will have little effect on controlling prices.

A combination of economic and political factors, such as rising Chinese demand and a deteriorating situation in Iraq, are at the root of the recent price surge. Terrorist attacks are happening even in Saudi Arabia, so prices will probably be volatile for a while in a higher range.

Crude oil prices soared at the beginning of the 1980s. According to the International Energy Agency (IEA), in today's dollars, a barrel of oil would have been around

US\$60 (¥6,600), a level much more shocking than the recent \$40-a-barrel range.

Oil importing countries have developed low-energy technologies and alternative energy sources, which have contributed to limiting rises in crude oil prices. The IEA is analyzing the possible effects on countries and regions if crude oil prices were to rise \$10 a barrel. The agency says the situation would suppress growth rates by 0.4 percentage point in Japan, 0.3 in the U.S. and 0.5 for the EU.

These figures do not appear very serious, yet we cannot ignore them. As seen in Japan already, rises in various commodity prices may drag on consumer spending and corporate revenues. If that were to happen, the economy and people's lives would be widely affected as businesses became reluctant to invest and stock prices took a beating from rising interest rates.

The Japanese economy has finally gotten back on the path to recovery, and the recent high oil prices may dampen that trend. In a worst-case scenario, rising commodity prices and a

return to a sluggish economy may arrive together. The government will have to be even more cautious about monetary and exchange policies.

Meanwhile, when it comes to oil suppliers, despite the attention now focused on the cartel, it is too soon to say we are witnessing a revival of OPEC's power. Disunity among its members has partly fueled the recent price increases. De facto OPEC leader Saudi Arabia is experiencing an unstable political situation, and Venezuela has resisted production increases.

Since the Sept. 11 terrorist attacks, the administration of U.S. President George W. Bush has pursued a strategy intended to make the U.S. less dependent on Saudi oil. This plan has included strengthening ties with Russia, which produces as much crude oil as Saudi Arabia, and putting Iraqi oil under U.S. control.

However, that strategy appears to be failing on two counts: Increasing concerns about the occupation of Iraq and unrest in Saudi Arabia. This is a troubling situation that cannot be resolved simply by OPEC production increases.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2004

## High oil prices hit airlines: IATA

Rising oil prices are putting the global airline industry's expected return to profitability this year in doubt, the head of the International Air Transport Association (IATA) said in Singapore on Monday.

IATA director-general Giovanni Bisignani, in his state of the industry address at the airline body's annual general meeting, told delegates the price of oil was the "fifth horseman of the Apocalypse" facing the sector.

"This year was meant to be the first profitable year for our industry this century," said Bisignani, former chief executive of Italy's flag carrier, Alitalia.

"Last year we survived the four horsemen

of the Apocalypse — SARS, (the) conflict in Iraq, terrorism and the (depressed) economy.

"But a fifth horseman, the price of oil, could add up to US\$1 billion per month to our costs and deny us profitability yet again."

He said IATA had initially projected the airlines would collectively book a \$3 billion profit in 2004 after racking up losses totaling \$30 billion over the past three years.

"Our projections of a \$3 billion profit this year were based on an average oil price of \$30 (a barrel)," Bisignani said.

"If oil prices average \$33, we break even. At \$36 we could expect \$3 billion losses." — AFP

16

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2004

# East Asia readies oil emergency measures

Teresa Cerojano  
*Associated Press/Manila*

**F**acing runaway oil prices and security fears, East Asian officials meeting in Manila are making emergency plans that include creating oil reserves and finding alternative sources for their energy imports.

Energy ministers from Japan, China, South Korea and the 10-member Association of Southeast Asian Nations or ASEAN will emphasize the need for oil stockpiling, with Japan and South Korea providing technical help, according to draft documents for the Manila meeting obtained Monday by *The Associated Press*.

"We recognize the importance of oil stockpile for sup-

ply security," said a draft of a joint statement, expected to be issued Wednesday.

The ministers also are calling for better sharing of oil data, more oil trade within Asia, dialogues and partnerships with producers outside the region, and investment in the alternative energy sources such as natural gas.

They want to bolster the dissemination of coal technology, and said coal is an abundant and economical energy resource in this region — which is becoming the world's largest consumer of energy.

A separate draft document said ASEAN energy ministers will adopt the so-called ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation for 2004-2009 — a plan for promoting sustainable energy development, integrated regional energy infrastructures and promoting energy security. It also contains policies for market reforms and liberalization, as well as environment protection.

Among the planned projects is the implementation of an ASEAN power grid and trans-ASEAN gas pipeline.

"The ministers reaffirmed that interconnected networks of electricity grids and gas pipelines in the ASEAN region offer significant benefits both in terms of security, flexibility and quality of energy supply and greater competition," the document said.

ASEAN ministers also agreed to consider a system of regional coordination during petroleum shortages and emergencies. In addition, they'll consider pursuing dialogue with Middle East oil-

producing countries to promote stable and secure energy markets in the region.

ASEAN, a market of more than 520 million people with a total area of 4.5 million square kilometers (1.74 million square miles), has a combined gross domestic product of about US\$610 billion and total trade of more than \$700 billion.

East Asian senior officials began the meeting in Manila's Makati financial district on Monday. It will be followed by a meeting of energy ministers from the ASEAN countries and Japan, South Korea and China on Wednesday. Ministers from the 21-member Asia-Pacific Economic Cooperation, which includes the United States, will meet on Thursday.

Philippine Energy Secretary Vincent Perez, chairman of the Manila meetings, said "the global energy industry is continuously faced with different challenges that could pose threats to the economic gains already achieved by the member economies."

Last month's attacks at the eastern Saudi oil center of Khobar that killed 22 people, most of them foreigners, have worsened fears terrorists could cripple Saudi Arabia's ability to export oil.

The Organization of Petroleum Exporting Countries agreed last week to raise its production ceiling by up to 11 percent over two months to help soothe a nervous market.

ASEAN's members are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

17

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

## Harga Minyak US\$ 36, Industri Penerbangan Rugi US\$ 3 Miliar

SINGAPURA - Kenaikan harga minyak mentah di pasaran dunia menjadi US\$ 36 per barel akan membuat industri penerbangan dunia merugi US\$ 3 miliar setahun.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal IATA (Asosiasi Angkutan Udara Dunia) Giovanni Bisignani, pada pembukaan rapat umum tahunan IATA World Air Transport Summit di Shangri-La Hotel Singapura, Senin (7/6) pagi.

Giovanni menyebutkan, kenaikan harga minyak sebagai "penunggang kuda kelima" yang akan melibas industri penerbangan dunia yang baru saja "sembuh" dari imbas "empat penunggang kuda" di tahun sebelumnya yaitu, wabah SARS, perang Irak, terorisme, dan krisis ekonomi.

IATA menyerukan anggotanya untuk meningkatkan efisiensi, antara lain dengan menyederhanakan proses bisnis (*simplifying the business*). Ia mencontohkan industri penerbangan domestic di AS yang telah 100 persen menggunakan tiket elektronik. Padahal, setiap tiket konvensional (kertas) biayanya mencapai US\$9. Artinya, dalam setahun industri penerbangan bisa menghemat US\$3 miliar dari 300 juta tiket kertas yang dikeluarkan IATA.

Sebelumnya, PM Singapura Goh Chok Tong yang membuka rapat umum tahu-

nan ke-60 ini mengatakan pentingnya industri penerbangan sebagai pemacu globalisasi. Ia mengakui kenyataan hadirnya lebih dari 4200 pusat perusahaan multinasional di Singapura adalah karena sukses bandara Changi sebagai hub bagi penerbangan internasional.

PM Goh dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Singapura sama sekali tidak melindungi Singapore Airlines (SIA). "Kami akan terus mengizinkan maskapai penerbangan internasional beroperasi melalui Changi tanpa restriksi," katanya. "Di mana SIA tidak diuntungkan, di situ bandara Changi diuntungkan. SIA harus mampu bersaing dengan maskapai internasional lainnya tanpa proteksi Pemerintah."

Pada 2003, 68 maskapai penerbangan internasional membawa 25 juta penumpang lewat Changi. Semuanya itu membawa dampak ekonomi yang positif bagi Singapura. "Keterhubungan dan status Changi sebagai hub internasional jauh lebih penting daripada kepentingan *flag carrier* kami," kata PM Goh seperti dilaporkan kontributor *Pembaruan Bondan Winarno* dari Singapura.

Konferensi ini juga dihadiri Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan dan Direktur Niaga Bachrul Hakim. ♦

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2004

## Dunia Penerbangan Rugi US\$ 3 Miliar Akibat Kenaikan Harga Minyak

### Jakarta, NERACA

Sejumlah perusahaan penerbangan global kemungkinan akan mennderita kerugian senilai US\$ 3 miliar pada tahun ini, jika harga bahan bakar jet tetap berada pada level US\$ 36 per barel, demikian Direktur Jenderal Asosiasi Angkutan Udara Internasional (IATA) Giovanni Bisignani kemarin, seperti dikutip AFX Asia.

"Harga minyak dapat menambab biaya hingga sampai US\$ 1 miliar per bulan pada biaya kami dan membuat profitabilitas kami terancam," kata Bisignani di depan Pertemuan Puncak Angkutan Udara Dunia/IATA yang berlangsung di Singapura.

Jika harga bahan bakar jet rata-rata US\$ 33 per barel, berbagai maskapai penerbangan global hanya mencapai titik impas (*break event point*).

Dikatakan, ketika beberapa waktu lalu IATA memproyeksikan laba senilai US\$ 3 miliar pada tahun ini untuk industri penerbangan sipil global, proyeksi didasarkan pada harga bahan bakar jet pada level US\$ 30 per barel. Dan tahun lalu, industri ini mengalami kerugian senilai US\$ 6,5 miliar.

### Minyak OPEC

Sementara itu, meski telah turun secara signifikan, harga minyak mentah dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sampai perdagangan kemarin masih tetap tinggi. Sekretariat OPEC di Wina kemarin mengumumkan, harga minyak OPEC yang dikenal dengan harga keranjang dari tujuh jenis minyak mentah paling penting itu telah turun pada Jumat malam pekan lalu sekitar 92 sen dollar AS menjadi US\$ 34,94 per barel. Namun demikian, pengamat pasar memproyeksikan harga minyak akan tetap tinggi di atas US\$ 30 per barel.

Suplai minyak yang membaik di AS. Pada saat yang sama, kata para analis, harga itu merefleksikan reaksi pasar terhadap pengumuman OPEC di Beirut, Kamis pekan lalu, tentang kenaikan kuota produksi sebanyak 2,5 juta barel per hari hingga Agustus.

Sementara itu, dari pasar Singapura di laporkan, sampai tengah jari kemarin (04.00 GMT), harga minyak mentah jenis light sweet Nymex untuk pengiriman

Juli diperdagangkan US\$ 38,36 per barel, turun dari penutupan di New York Jumat pekan lalu US\$ 38,49 per barel.

Namun kalangan dealer tetap khawatir apakah kontrak penyerahan kemudian Nymex dapat menopang tren penurunan harga ke arah di bawah US\$ 38 dolar AS. "Harga ini tergantung pada situasi keseluruhan di Timur Tengah," kata seorang pedagang pada perusahaan perdagangan minyak Jerman.

Dia mengatakan, harga minyak dapat dengan mudah naik menghadapi adanya tanda-tanda yang cerah di bagian lain Arab Saudi dan Timur Tengah.

Menteri Energi Kuwait Sheikh Ahmad al-Fahd al-Sabah pekan lalu memperkirakan, kesepakatan OPEC untuk meningkatkan produksi sebesar 2 juta barel per hari mulai 1 Juli mendatang diharapkan bisa menekan harga minyak US\$ 6-US\$ 8 per barel. "Bahkan beberapa rekan di OPEC berharap penurunan itu US\$ 8 sampai US\$ 10," kata Sheikh kepada wartawan seusai menghadiri pertemuan OPEC, di Beirut, Libanon, pekan lalu. (\* / 44)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

## Tender Blok Migas Baru Tak Libatkan Pemda

JAKARTA - Pembukaan tender 10 blok wilayah kerja minyak dan gas (migas) baru yang dilakukan awal Juni, dipastikan tidak melibatkan pemerintah daerah (pemda). Peralnya, selain proyeknya berisiko tinggi, badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai sanggup bersaing dengan peminat tender lainnya yang kebanyakan adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA), masih sangat minim.

Menurut anggota Dewan Pakar Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM), Andang Bachtiar, saat ini BUMD yang diharapkan sanggup ikut bermain dalam tender blok migas baru hanyalah PT Bumi Siak Pusako di Provinsi Riau.

"Kami tidak yakin, daerah (BUMD) akan bisa terjun langsung dalam tender baru. Risiko lingkungan maupun risiko manfaatnya sama-sama tinggi. Pemerintah pusat tentu tidak akan begitu saja menyerahkan pemda," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Pembukaan tender blok migas baru tersebut sempat mengalami penundaan beberapa kali, karena belum adanya aturan yang baku mengenai perpajakan bagi industri

migas. Namun, akhirnya Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan memulai proses tender 10 blok migas baru pada awal Juni 2004, meskipun Departemen Keuangan (Depkeu) belum mengeluarkan keputusan mengenai aturan perpajakan itu.

Direktur Jendral (Dirjen) Migas Departemen ESDM, Iin Ariffin Takhyan mengatakan, proses tender dilakukan bersamaan dengan pembahasan mengenai aturan perpajakan. Kesepuluh wilayah kerja yang ditawarkan itu sebagian besar terletak di perairan (*off shore*) lepas pantai, seperti Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Arafura, dan Sulawesi Selatan.

"Kami tidak bisa mengundur terlalu lama lagi, mengingat rencana pembukaan tender sudah lama tertunda. Depkeu harus segera menyelesaikan masalah perpajakan yang dikenakan kepada kontraktor bagi hasil (KPS). Kami meminta bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri migas tidak dipungut lagi, karena itu sudah masuk dalam komponen bagi hasil investor dengan pemerintah," katanya.

Dia menambahkan, selain

melalui tender, pemerintah juga menawarkan 10 wilayah kerja migas melalui mekanisme penawaran langsung (*direct offer*), antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua.

Menurut Iin, sebenarnya para investor telah menyatakan berminat dengan blok-blok tersebut. "Namun, pemerintah tidak bisa langsung memberikannya, tetapi harus membuka tender terlebih dulu. Kalau tidak ada yang berminat, pemerintah akan langsung memberikannya kepada perusahaan yang sudah mengajukan proposal," katanya.

Dia juga mengatakan, untuk menarik lebih banyak investor di sektor migas, beberapa waktu lalu Departemen ESDM setuju akan memberikan sejumlah insentif bagi para investor yang bersedia mengembangkan wilayah kerja yang berada di daerah laut dalam (*remote area*). Insentif tersebut bisa berupa perbedaan bagi hasil (*split*) ataupun kredit investasi.

"Prinsipnya, kalau wilayah kerjanya di daerah yang biasa, untuk gas, *split* yang diterapkan juga biasa, yaitu 70 persen pemerintah dan 30 in-

vestor. Sedangkan untuk minyak 85 persen pemerintah dan 15 persen investor," katanya.

### Dana Bagi Hasil

Sementara itu, pemerintah melalui Depkeu telah menetapkan perkiraan jumlah dana bagian daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam (migas) untuk tahun anggaran 2004, yakni sebesar Rp 9,188 triliun. Dalam siaran pers yang diterima *Pembaruan*, disebutkan dana tersebut akan didistribusikan secara proporsional kepada 14 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi itu.

Pembagian perkiraan dana bagi daerah itu meliputi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1,621 triliun, Sumatera Utara Rp 42,708 miliar, Riau Rp 2,951 triliun, Kepulauan Riau Rp 108,062 miliar, Jambi Rp 34,333 miliar, Sumatera Selatan Rp 743,245 miliar, Bangka Belitung Rp 13,692 miliar, Lampung Rp 103,114 miliar, DKI Jakarta Rp 45,110 miliar, Jawa Barat Rp 400,904 miliar, Jawa Timur Rp 18,488 miliar, Kalimantan Timur Rp 3,101 triliun, Sulawesi Tengah Rp 0,378 miliar, dan Maluku Rp 4,019 miliar. (E-13)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 3											
TAHUN 2004											

## Depkeu Tetapkan Dana Bagi Hasil Migas Daerah

JAKARTA — Departemen Keuangan telah menetapkan perkiraan jumlah dana bagian daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam untuk tahun anggaran 2004. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.06/2004 tanggal 31 Mei 2004, perkiraan jumlah dana bagian daerah tersebut sekitar Rp 9.188,908 miliar.

"Secara proposional, jumlah dana bagian daerah tersebut akan didistribusikan kepada 14 provinsi," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Maurin Sitorus, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Maurin mengatakan ada 14 provinsi yang berhak menerima dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam untuk daerah penghasil.

Keempat belas provinsi tersebut adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan jumlah bagi hasil sebesar Rp 1.621,593 miliar, Sumatra Utara sebesar Rp 42,708 miliar, Riau Rp 2.951,520 miliar, dan Kepulauan Riau Rp 108,062 miliar. Jambi memperoleh dana bagi hasil migas sebesar Rp 34,3 miliar, sedangkan Sumatra Selatan mendapatkan dana tersebut dengan jumlah sebesar Rp 743,245 miliar.

Selain enam provinsi tersebut yang memperoleh dana bagi hasil migas, delapan provinsi lainnya juga berhak menerima dana bagian daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Yakni, Provinsi Bangka Belitung yang memperoleh dana bagi hasil migas sebesar Rp 13,692 mi-

liar, Lampung sebesar Rp 103,114 miliar, DKI Jakarta Rp 45,110 miliar, Kalimantan Timur Rp 3.101,742 miliar, dan Maluku Rp 4,019 miliar. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah memperoleh dana bagi hasil migas masing-masing sebesar Rp 400,904 miliar, Rp 18,488 miliar, dan Rp 0,378 miliar.

Maurin mengatakan perkiraan dana bagian daerah dari minyak bumi dan gas alam 2004 itu tertuang pada SK Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.06/2004 tanggal 31 Mei 2004. Dan menurut Maurin, SK Menteri Keuangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Peraturan Pe-

merintah nomor 104/2000 tersebut kini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001.

Lebih jauh, Maurin menambahkan bahwa perkiraan jumlah dana bagian masing-masing daerah disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2004. Selain berdasarkan UU Nomor 28/2003, perkiraan jumlah dana bagian tiap daerah juga disusun berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356K/80/MEM/2004 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi serta pertambangan umum tahun 2004. ■ dip

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2004

## Dewan Keberatan Penjualan Kapal Tanker Pertamina

JAKARTA — Kalangan DPR menyatakan keberatan atas rencana PT Pertamina untuk menjual dua kapal tanker yang tengah dibuat di Korea Selatan. Selain akan tetap membuat Pertamina menjadi sapi perahan pencarter tanker, juga tercium adanya konspirasi yang kurang bagus.

Apalagi Pertamina menggunakan jasa perusahaan Amerika untuk melego dua kapal tersebut melalui tender tertutup di Singapura. "Mengapa harus di Singapura? Kita kan punya Jakarta, yang lebih representatif untuk tender itu," ungkap anggota Komisi VIII DPR, Zulkifli Halim, kepada *Republika* di Jakarta, Senin (7/6).

DPR mencium gelagat tidak beres dalam rencana menjual dua kapal tanker itu. "Kami menduga, kapal ini akan dibeli oleh sebuah komplotan yang suka menjual aset negara. Dia bekerja sama dengan investor asing. Kapal itu nantinya akan disewakan ke Pertamina," papar Zulkifli.

Berdasarkan Kepres No 43/2003 tentang Pemesanan Tanker, direksi lama Pertamina menganggarkan pembelian enam kapal. Dua di antaranya yang berkapasitas 260.000 DWL — dengan harga satuan 130 juta dolar AS — diproduksi oleh Hyundai Heavy Industries, Korea Selatan. Dua kapal ini akan diberi nama Tanker Raksasa Soekarno-Hatta.

Sedangkan empat tanker lainnya yang berkapasitas puluhan ribu DWL, menurut Zulkifli, dibuat di dalam negeri oleh PT PAL. Biaya pembelian dua kapal pertama, lanjut Zulkifli, Pertamina mendapat tawaran kredit sangat lunak dari Bank Korea.

Sedangkan kekurangannya, Pertamina mencanangkan penjualan obligasi. Dengan begitu, kapal tersebut bisa lunas dalam jangka delapan tahun. Sebelum proses kredit dan penjualan obligasi selesai, Pertamina pun sudah membayar uang muka dan mulai mencicil pembeliannya.

Nilai kapal itu kini sudah naik sekitar 30 persen dari harga pembeliannya. ■ zam

22

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<b>JUN</b>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

## Pertamina Tawarkan 26 SPBU

SURABAYA — PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran (UPms) V menginvestasikan dananya Rp 60 miliar untuk merealisasikan pembangunan 26 Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) di wilayah Jatim dan Bali. Ke-26 SPBU tersebut pengoperasiannya akan ditawarkan secara waralaba kepada para investor melalui sistem tender. "Mungkin Pertamina hanya akan punya saham sekitar 10-20 persennya," kata Hariyoto Saleh, general manager PT Pertamina UPms V, Senin (7/6).

Menurut Hariyoto, pembangunan 26 SPBU tersebut merupakan bagian dari

rencana Pertamina pusat membangun sejumlah SPBU di seluruh Indonesia selama tahun 2004 ini. Selain itu, Pertamina juga ingin mempunyai SPBU yang sesuai standar sendiri. Sehingga, SPBU-SPBU yang ada nantinya bisa mengacu pada standar Pertamina.

Dia menambahkan, rencana pembangunan SPBU tersebut juga dimaksudkan untuk menghadapi persaingan pasar bebas mulai 2005 mendatang. Dalam persaingan pasar bebas, perusahaan asing bisa lebih bebas beroperasi masuk ke Indonesia. "Jadi kami harus bersiap diri mengantisipasinya," jelasnya.

Dia mengakui pada tahun 1980-an lalu, semua SPBU menjadi milik Pertamina. Tapi, selanjutnya dilakukan swastanisasi terhadap SPBU-SPBU tersebut, namun sekarang ini untuk anti-

sipasi era globalisasi, Pertamina juga harus memiliki SPBU sendiri.

Hingga saat ini, lanjut dia, 26 proposal investor pembangunan SPBU tersebut sudah diterima Pertamina. Rencananya, dari 26 SPBU tersebut akan dibangun di Jatim sebanyak 20 unit dan Bali enam unit. Rinciannya, di Surabaya sebanyak delapan unit, Sidoarjo empat unit, serta Jombang, Jember, Mojokerto, Tuban, Blitar, Madiun, Batu, dan Banyuwangi masing-masing satu unit. Investasi untuk bangunan setiap unit SPBU diperkirakan mencapai Rp 2-3 miliar di luar investasi untuk tanah.

Hariyoto berharap ke-26 SPBU itu sudah bisa dioperasikan semuanya pada tahun 2004 ini. Tetapi paling lambat kemungkinan sampai awal tahun 2005 mendatang. ■ ita

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2004

## Menjual ke Industri dan Tempat Oplosan Delapan Pangkalan Minyak Tanah Ditutup

**MEDAN (Media): Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) I Medan menutup delapan pangkalan minyak tanah yang menjual bahan bakar ke industri dan tempat pengoplosan.**

Kepala Humas Pertamina UPMS I Medan Juliadi kepada *Media* di Medan, kemarin, mengatakan, penyelewengan minyak tanah tersebut terungkap oleh Tim Pelaksana Pusat Penanggulangan Bahan Bakar Minyak Tanah (TP3 BBM) yang melakukan investigasi di beberapa kabupaten dan kota di Sumatra Utara (Sumut) enam bulan terakhir.

"Pangkalan minyak itu ada yang menjual minyak tanah ke industri, ada juga yang menjual ke tempat-tempat ilegal lainnya, seperti tempat pengoplosan," kata Juliadi.

Selain menutup delapan pangkalan, katanya, pihaknya juga memutuskan hubungan usaha dengan dua agen.

Dia mengatakan, penyebab utama kelangkaan minyak tanah di beberapa wilayah Sumut adalah praktik pengoplosan. Praktik tersebut ditemukan di 10 titik rawan. "Titik rawan tersebut antara lain kawasan adalah Labuhan Deli, Titi Kuning, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Lintas Sumatra mulai dari Medan hingga Kota Tebing Tinggi," ujarnya.

Namun, Juliadi menyesalkan sikap aparat yang tidak menindak para pelaku. Padahal, pihak-

nya telah melaporkan hasil investigasi tersebut mereka kepada pihak kepolisian.

"Bahkan, kami sudah serahkan data-data pelanggaran pendistribusian dan pengoplosan minyak tanah itu ke pihak Polda Sumut. Tapi hingga kini belum ada hasilnya," ujarnya.

Sedangkan untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di wilayah ini, Pertamina UPMS I telah menggelar operasi pasar (OP) sebanyak 80% dari target. OP minyak tanah itu dilakukan sejak sebelum pemilu legislatif pada April lalu.

Pertamina juga membatasi pembelian minyak tanah oleh masyarakat, yaitu maksimal 20 liter per bulan untuk setiap keluarga. Meski demikian, kata Juliadi, masih ada masyarakat yang bisa membeli bahan bakar ini lebih dari 30 liter. Menurut dia, hal tersebut terjadi akibat masih lemahnya pengawasan penjualan minyak tanah.

### Cari bukti

Sementara itu, agen dan pangkalan minyak tanah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), juga diduga menjual minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga kepada industri sehingga terjadi kelangkaan.

"Setelah kita kaji berdasarkan

data yang ada dan masukan dari berbagai pihak, kita menduga minyak tanah dijual oleh agen atau pangkalan kepada industri. Sekarang kita tinggal mencari bukti," kata Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Ahmad H Hasan dalam rapat dengan pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Kendari dan instansi terkait di Kendari, kemarin.

Namun, DPRD kecewa karena Depot PT Pertamina dan Wira Penjualan Pertamina tidak hadir dalam rapat tersebut. Bahkan, alasan ketidakhadiran Pertamina dalam rapat tidak disampaikan langsung kepada DPRD, melainkan melalui pengurus Hiswana Migas.

Berdasarkan data tentang ketersediaan minyak tanah di Kendari, kata Ahmad, kebutuhan warga Kendari atas bahan bakar itu sebanyak 825.000 liter per bulan. Jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan dari 200.000 penduduk dikalikan kebutuhan minyak tanah 3,75 liter per orang setiap bulan.

Padahal, Pertamina menyuplai minyak tanah untuk rumah tangga di kota ini sebanyak 1.200.000 liter. Sehingga seharusnya ada kelebihan di pasaran sebanyak 375.000 liter per bulan.

"Jadi, semestinya ada kelebihan minyak tanah, sementara sekarang terjadi kelangkaan. Nah, ke mana larinya minyak tanah ini?" tanya Ahmad.

Sekretaris Hiswana Migas Kota Kendari Syamsuddin mengakui, kelangkaan minyak tanah tidak seharusnya terjadi jika saja seluruh minyak tanah disalurkan sesuai peruntukan.

Di Kalimantan Selatan, minyak tanah juga semakin sulit diperoleh. Tidak transparannya distribusi oleh Pertamina diduga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengecer Minyak Tanah (Aspemita) Kalsel Mustakin kepada *Media*, Minggu (6/6), mengatakan, penyebab kelangkaan minyak tanah di hampir seluruh wilayah Kalsel disebabkan adanya penyimpanan minyak tanah untuk rumah tangga kepada industri dan peruntukan lain seperti untuk angkutan sungai.

(KN/DY/Ant/N-2)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Perusahaan Migas

## Amerada Hess Bantu Masyarakat Pangkah Kembangkan Keterampilan Kelola Hasil Laut

Jakarta, NERACA

Perusahaan kontraktor *production sharing contract* (PSC) migas Amerada Hess membantu masyarakat Ujung Pangkah Jawa Timur memperoleh keterampilan mengenai pengolahan dan pengelolaan hasil laut sebagai upaya memberdayakan ekonomi penduduk setempat.

Menurut Kadin Hupmas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Amir Hamzah, pemberian keterampilan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah akademi perikanan Gresik yang dilakukan dalam tiga gelombang, di mana masing-masing gelombang berjumlah 20 orang.

"Kami berharap, melalui program ini, masyarakat Pangkah lebih kreatif dalam mengolah dan mengelola hasil laut. Selama ini, penjualan hasil laut yang umumnya dilakukan kepada tengkulak, tidak menguntungkan nelayan, karena harga yang ditetapkan jauh dari harga yang wajar," kata Amir kepada *Neraca* di Jakarta kemarin.

Ia mengatakan, kegiatan yang merupakan bagian dari program *community development* (pengembangan masyarakat) itu, untuk

gelombang pertama difokuskan pada keterampilan pengolahan ikan bandeng tandu (tanpa duri), yang merupakan potensi ekspor ke Amerika Serikat.

"Ada pihak yang sudah siap menampung ikan bandeng segar tanpa duri untuk kemudian diekspor. Bagi kita, peluang ini sama sekali belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan pihak sekolah perikanan kepada siswa dari Pangkah, diharapkan bisa menjawab peluang ini," kata Amir.

Ditambahkan, seluruh biaya pendidikan tersebut ditanggung pihak Amerada Hess. Rencananya, peserta yang sudah mendapatkan kursus singkat mengenai pengolahan hasil laut, akan dibantu pihak Amerada Hess, baik mengenai pemasarannya, maupun mencari alternatif permodalan usaha.

"Target pendidikan ini memang memberdayakan ekonomi masyarakat Pangkah, tempat di mana Amerada Hess melakukan operasi migasnya. Sebagai pihak yang mendukung kegiatan ini, Amerada Hess juga akan menampung hasil usaha mereka sepanjang sesuai kebutuhan," katanya.

Amerada Hess merupakan kontraktor minyak dan gas (migas) bagi hasil yang memiliki wilayah operasi di lepas pantai Pangkah, Jawa Timur. Blok Pangkah ini sebelumnya dikelola sebuah perusahaan migas dari Inggris Premier Oil Ltd. Perusahaan tersebut (Premier) kini lebih banyak konsentrasi di Blok Natuna, yang bersama-sama Conoco mengespor gas alam ke Singapura.

Pengembangan Pangkah kini tinggal menunggu kesepakatan jual beli gas dengan pihak PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kabarnya, setelah dilakukan negosiasi cukup lama, penandatanganan jual beli gas (*gas sales agreement*/GSA) akan segera ditandatangani pekan ketiga bulan Juni ini, atau tepatnya tanggal 25 Juni mendatang.

Rencananya, selain Amerada Hess, beberapa perusahaan migas lainnya di Jaatim, juga pada tanggal yang sama akan menandatangani GSA, di antaranya Medco dan ConocoPhilips dengan sejumlah konsumen seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Petrokimia Gresik. (31)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td> <td style="width: 10%;">FEB</td> <td style="width: 10%;">MAR</td> <td style="width: 10%;">APR</td> <td style="width: 10%;">MEI</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; border-radius: 50%; text-align: center;">JUN</td> <td style="width: 10%;">JUL</td> <td style="width: 10%;">AGST</td> <td style="width: 10%;">SEPT</td> <td style="width: 10%;">OKT</td> <td style="width: 10%;">NOV</td> <td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
<span>HALAMAN : 5</span> <span>TAHUN 2004</span>																																												

**Pemrov Sulteng persoalkan minyak tanah**

PALU (Bisnis): Terjadinya kelangkaan minyak tanah di Sulawesi Tengah akhir-akhir ini mulai dipersoalkan beberapa instansi terkait di lingkungan Pemprov Sulteng.

Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Sulteng Nadjib Godal mengemukakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan beberapa instansi terkait untuk memecahkan masalah minyak tanah yang telah meresahkan masyarakat.

Pertemuan yang digelar akhir pekan lalu kata dia dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi a.l. ketua Hiswana Migas Sulteng Syamsudin Umar, Wira Penjualan Pertamina Arief Prianto, Kabag Informasi Pasar Ekonomi Eda Nur Ely, Utusan Dinas Perindagkop Sulteng Abdul Kahar, Utusan Dinas Perindagkop kota Palu Sudin Dg M, Anggota Poldas Sulteng M Taufik, Dishub Sulteng Syarifuddin Bolong, Dispenda Sulteng Herry Palor, Diskimpraswil Sulteng Djasmin Basiba, dan Kabag Ekonomi \*Harga Sulteng Ridwan Mumu.

Masing-masing instansi dalam pertemuan tersebut diberi kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan, pendapat, dan saran guna menemukan solusi terhadap langkanya minyak tanah di Sulawesi Tengah akhir-akhir ini. (k6)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 3.8																																												
TAHUN 2004																																												

SEKILAS KOMODITAS

**Arab Saudi tak ingin harga minyak Nymex lampau \$30**

DALLAS (Bloomberg): Arab Saudi tidak menghendaki harga kontrak berjangka minyak mentah di New York Mercantile Exchange diperdagangkan diatas US\$30 per barel, ungkap penasihat urusan luar negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir.

"Kami tidak yakin harga minyak melampaui US\$30 di bursa Mercantile, karena seharusnya berkisar hanya US\$28 untuk *crude basket* yang menurut kami kisaran moderat dan memang

diharapkan," ujar al-Jubeir seperti dikutip CNN.

Organisasi negara-negara eksportir minyak (OPEC) menyepakati kenaikan produksi terbesar dalam enam tahun ini, untuk mencegah terus meroketnya harga yang dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

OPEC menaikkan target hingga 2 juta barel per hari atau 8,5%, dan akan bertambah lagi 500.000 barel per hari pada Agustus, ujar Menteri Minyak Saudi Ali Naimi. (roy)

27

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2004

# Terror not economics rules price of oil

**Ghalib Chaudhuri**  
*The Daily Star*  
Asia News Network/Dhaka

Historically, higher oil prices had always led to blaming Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), unless of course the disruption in the supply was caused by external factors, like war.

Under normal circumstances when prices shoot up, OPEC, who holds the pricing power through control of substantial supply and spare capacity, becomes the whipping boy for the rest of the world.

It is usually blamed for not using its flexible spare capacity to increase supply and match the growth in world demand, thereby helping release pressure on prices. This time however with prices of

the liquid gold hovering at US\$40 a barrel, OPEC is hardly the culprit. In fact it is bending over backward to bring the extra supply into the market and ease pressure on prices, but curiously to no avail.

The three principal factors that are purported to be driving the prices are global growth, supply chain bottlenecks, and, perhaps the most intractable of all, terrorism.

Sudden spurt in global growth has led to a higher demand for oil. This, according to a recent report by the International Energy Agency (IEA), has led to oil consumption rising to a 16-year high, adding an additional requirement of 3.6 million barrels per day (b/d) between the period 2002 and 2004.

But with the supply of oil also rising in tandem with demand, the current oil price is a paradox, defying the fun-

damental rules of economics. IEA estimates that there is in the first quarter of 2004 an excess of oil supply, including inventory, of 1.2 million b/d. So it is not lack of supply that is causing the price hike. Also, the recent OPEC decision to further increase supply has hardly dented its market price, which proves that excess demand is not the real cause.

Another reason that has been cited for higher prices is the bottleneck in the supply chain created in the U.S. The refining capacity of North America is unable to keep up with the surge in demand for oil in the American economy, which has, since the third quarter of last year, shown spectacular reversal in growth. However as stated earlier the North American market is only answerable for 24 percent of increased demand for oil, making it less

of a reason for the price hike.

So if higher demand for oil and supply chain bottlenecks don't fully explain higher prices, than what does? The futures market for oil perhaps provides the clue. At the New York Mercantile Exchange (NYMX), the largest commodity exchange in the world, the net long position of speculators in future contracts on oil have risen sharply since April this year, causing prices to move up. Uncertainty caused by terrorism is the principal reason behind the speculators driving the future price of oil higher. The fear that a random act of terrorism could severely disrupt the supply, which is already tight as it is, must be a constant concern for the market.

The recent acts of terrorism in Saudi Arabia have greatly increased the fear factor. It is not inconceivable that impor-

tant oil installations in Saudi Arabia may fall prey to terrorism, resulting in reduced or even cessation of supply from the Kingdom, which accounts for 10 percent of current global production. And if that were to happen, unfortunately, there is no other existing capacity anywhere globally to fill this shortfall, at least in the short term. The terror premium on oil prices today is estimated to be in the region of 4 to 8 percent and is not likely to disappear overnight. This overhang of terror will persist for some time, however the risk premium may fluctuate within a range, depending on the frequency, intensity, and target of the unfolding acts of terror.

Assuming that higher oil prices are here to stay, should the world be worried by its effect on growth? Evidently not, according to the joint

findings of IEA and OECD.

Sadly and understandably, higher prices have a disproportionately greater effect on developing Asia and more so in poor highly indebted countries than the Western economies. Whilst in its manufacturing frenzy, Asia is busy guzzling up fuel, U.S. and other Western economies have over the years learnt to be more fuel-efficient. Unfortunately Asia needs twice as much oil to produce one unit of output compared to the U.S. Nevertheless, if prices stay at current levels, the overall effect is not that devastating.

With terrorism taking the center stage as a cause for higher oil prices, the future of price stability for oil remains murky. The reason lies more in the realm of geopolitics than economics, the latter being relatively easier to predict. Terrorism is a social phenom-

enon that evolves out of complicated and deep-rooted resentment that cannot be eradicated overnight, even if one tries through force or by correcting the wrong.

From anecdotal evidence it seems clear that Islamic militancy in Saudi Arabia is more widespread than initially believed. As long as this understanding prevails in world markets, oil prices will continue to command a risk premium.

Unfortunately, despite a rumored pact between the House of Bush and the House of Saud for lower oil prices during the election year, events have already shown that honoring the agreement may turn out to be difficult if not impossible.

*The writer is managing partner of Octavian Associates.*